

BAB II

KESETARAAN GENDER DAN MILITER DI NORWEGIA

Pembangunan jelas merupakan salah satu aspek penting yang diperhatikan oleh suatu negara. Dalam hal ini, sistem internasional kemudian menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan tujuan global yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi manusia, di mana tujuan pembangunan tersebut perlu memerhatikan aspek keseimbangan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan (UNDP, 2015). Salah satu tujuan yang ditetapkan di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah Kesetaraan Gender atau *Gender Equality* yang merupakan tujuan nomor lima.

Menurut *United Nations Children's Fund* atau UNICEF, kesetaraan gender dapat diartikan sebagai konsep di mana perempuan dan wanita berada dalam lingkungan yang setara serta mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tujuan pemenuhan potensi masing-masing serta hak asasi manusia, yang dapat berdampak positif kepada pembangunan secara ekonomi, sosial, budaya, maupun politik negara (UNICEF, 2017). Melalui pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa dalam konsep kesetaraan gender, kepentingan dan kebutuhan dari pria maupun wanita perlu menjadi pertimbangan dalam pemenuhannya. Selain itu, melihat pentingnya arti kesetaraan gender, maka dapat dipahami pula bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia yang juga

perlu menjadi pertimbangan dalam terjadinya pembangunan yang berfokus kepada manusia.

Mengingat arti penting dari kesetaraan gender, maka negara-negara saat ini berusaha untuk menerapkan kebijakan yang dinilai dapat mencapai tujuan tersebut. Di antara berbagai negara dan upayanya, Norwegia merupakan salah satu negara yang terkenal akan penerapan kesetaraan gender di dalamnya.

2.1 Kesetaraan Gender Di Norwegia

2.1.1 Sejarah Singkat Kesetaraan Gender Di Norwegia

Tercapainya tingkat kesetaraan gender yang tinggi di Norwegia seperti saat ini dapat terjadi karena proses yang panjang dalam sejarah Norwegia. Terbentuknya Kerajaan Norwegia sebagai sebuah negara yang independen, setelah berpisah dengan Swedia pada tahun 1814 tidak secara langsung memunculkan kesetaraan gender di negara tersebut, serta wanita tidak semerta-merta langsung mendapatkan segala hak dan kesempatannya secara adil seperti sekarang ini. Salah satu peristiwa penting dalam upaya pemberdayaan wanita dan meningkatkan kesetaraan gender dapat dilihat dari diperolehnya hak untuk memilih (*rights to vote*) dalam lingkup politik. Norwegia, seperti kebanyakan negara lainnya, tidak langsung memberikan hak untuk memilih bagi wanita. Wanita di Norwegia diberikan hak untuk memilih secara terbatas pada pemilihan tingkat daerah pada tahun 1901, di mana hak tersebut hanya diberikan kepada wanita yang telah memenuhi kewajiban pajaknya atau telah menikah dengan pria yang akan membayar pajaknya. Kemudian pada 1907, hak untuk memilih dalam pemilihan nasional diberikan kepada wanita secara

terbatas, yaitu berdasarkan jumlah pendapatan. Pada 1910, Norwegia kemudian menerapkan hak untuk memilih secara universal bagi wanita dalam pemilihan lokal dan diikuti oleh hak untuk memilih secara universal bagi wanita dalam pemilihan nasional pada tahun 1913 (Blom, 1980:3-22). Keputusan tersebut secara resmi diambil oleh keputusan secara menyeluruh oleh parlemen Norwegia (*Storting*) pada 11 Juni 1913. Perkembangan dalam hal politik juga terjadi pada tahun 1911, saat Anna Rogstad menjadi anggota Parlemen (*Storting*) wanita pertama (The Equality and Anti- Discrimination Ombud, n.d.).

Tak hanya dalam aspek politik, kesetaraan gender di Norwegia dalam aspek lainnya juga membutuhkan proses yang tidak instan agar wanita dapat memperoleh haknya. Dalam aspek pendidikan, pada tahun 1959, *Lov om Folkeskolen* atau Peraturan mengenai Pendidikan mulai diberlakukan sejak 10 April 1959. Melalui hukum ini, murid perempuan dan laki-laki memiliki hak untuk mendapatkan kurikulum pendidikan dasar yang sama. Lalu pada 1978, Hukum mengenai Kesetaraan Gender (*Gender Equality Act*) berhasil untuk diadopsi pada 9 Juni 1978 dan diberlakukan pada 1979. Melalui hukum tersebut, perlindungan terhadap hak wanita secara legal ditetapkan. Dalam aspek lain, seiring dengan berjalannya waktu, wanita pun semakin mendapatkan hak yang semestinya, seperti contoh dalam aspek kesehatan, diberlakukan Undang-Undang mengenai Aborsi (*the Abortion Act*) pada 1978. Semua kementerian di Norwegia pun turut memiliki kewajiban untuk memasukkan aspek kesetaraan gender dalam rancangannya (The Equality and Anti- Discrimination Ombud, n.d.). Contoh dari beberapa kebijakan yang tertera terkait dengan kesetaraan gender hanyalah sebagian kecil dari proses yang terjadi selama

lebih dari satu abad di Norwegia. Banyaknya peraturan-peraturan yang diciptakan seiring dengan berjalannya waktu tersebut menunjukkan bahwa Norwegia terus berupaya untuk mempertahankan komitmennya untuk menjunjung kesetaraan gender di negaranya.

2.1.2 Dasar Hukum Kesetaraan Gender Di Norwegia

Komitmen dari Norwegia akan kesetaraan gender dapat dilihat melalui peraturan yang ada di dalam negaranya. Di Norwegia, terdapat Hukum mengenai Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang No 45 tanggal 9 Juni 1978 yang kemudian diganti oleh Undang-Undang No. 51 Tanggal 16 Juni 2017 mengenai Kesetaraan dan Anti Diskriminasi (Ministry of Children and Family Affairs, 2007). Pada awalnya, dalam Pasal 1 dari Hukum mengenai Kesetaraan Gender dijelaskan bahwa tujuan dari dibentuknya perundang-undangan tersebut adalah untuk meningkatkan kesetaraan antara pria dan wanita dengan meningkatkan derajat perempuan gender dalam seluruh sektor dalam masyarakat (ILO, 1978). Namun saat dilakukan perubahan pada hukum, ruang lingkup dari perlindungan terhadap kesetaraan gender semakin diperluas. Hal ini dapat dilihat dalam fungsi dari hukum tersebut. Berdasarkan situs resmi Pemerintah Norwegia, peraturan ini memiliki fungsi untuk meningkatkan kesetaraan serta mencegah terjadinya diskriminasi yang dilatarbelakangi oleh alasan sex, kehamilan, cuti kehamilan maupun adopsi, tugas perawatan, etnis, agama, pandangan hidup, disabilitas, orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, umur, serta kondisi lainnya. Melalui hukum yang diterapkan tersebut, Norwegia memandang bahwa kesetaraan berarti tersedianya

kesempatan yang setara, serta hak yang setara juga. Maka dari itu, hukum ini juga kemudian berfokus untuk meningkatkan posisi dari wanita serta kaum minoritas, sehingga dapat mengurangi tantangan sosial bagi kaum minoritas dan mencegah tantangan yang baru (Ministry of Culture and Gender Equality, 2016).

2.1.3 Kesetaraan Gender Di Norwegia Saat Ini

Setelah dikeluarkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, negara-negara semakin menyadari pentingnya aspek kesetaraan gender. Karena hal tersebut, organisasi internasional pun berusaha untuk menciptakan indikator penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dari suatu negara. Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam memandang tingkat kesetaraan gender adalah melalui data *Gender Inequality Index* (GII) atau Indeks Ketimpangan Gender yang dikeluarkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Development Programme* (UNDP). GII menunjukkan hilangnya potensi pembangunan manusia akibat disparitas antara perempuan dan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan tenaga kerja. Dari hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa tingkat GII berdampak kepada tingkat pembangunan manusia di suatu negara atau *Human Development Index* (HDI) (UNDP, n.d.). GII memiliki nilai yang berkisar antara 0 sampai 1, di mana semakin tinggi angka akan berarti semakin tinggi pula tingkat ketidaksetaraan. Berdasarkan laporan pembangunan manusia (*Human Development Reports*) yang dikeluarkan oleh UNDP, pada tahun 2019, Norwegia memiliki tingkat pembangunan manusia yang tergolong sangat tinggi (*very high*

human development) dengan urutan pertama, dengan nilai GII sebesar 0,045 dan setara dengan urutan keenam (UNDP, 2020), sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2. 1 Data Indeks Ketimpangan Gender 2019

		Indeks Ketimpangan Gender	
		Nilai	Peringkat
	Peringkat	2019	
	Indeks Pembangunan Manusia (HDI)		
<i>Very High Human Development</i>			
1	Norwegia	0.045	6
2	Irlandia	0.093	23
3	Swiss	0.025	1
4	Hong Kong, PRC	-	-
4	Islandia	0.058	9
6	Jerman	0.084	20
7	Swedia	0.039	3
8	Australia	0.097	25
8	Belanda	0.043	4
10	Denmark	0.038	2

Sumber: *United Nations Development Programme, 2020*

Selain Indeks Ketimpangan Gender, terdapat pula Laporan Kesenjangan Gender (*Gender Gap Report*) yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) yang dapat menjadi acuan untuk melihat tingkat kesetaraan gender suatu negara. Terdapat empat hal utama yang dijadikan indeks dalam meninjau tingkat kesenjangan gender dalam laporan ini, yaitu partisipasi dan kesempatan ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan politik. Pada tahun 2020, Norwegia menempati urutan kedua dari total 153 negara dalam Indeks Kesetaraan Gender Global atau *The Global Gender Gap Index* (World Economic Forum, 2020, p. 9), sebagaimana yang tertera dalam tabel 2.2 di bawah ini, yang hanya mencakup peringkat dua puluh teratas.

Tabel 2. 2 Peringkat Indeks Kesetaraan Gender Global 2020

Peringkat	Negara	Nilai	<u>Perubahan</u> <u>Peringkat</u>	<u>Perubahan Skor</u>	
		0-1	2018	2018	2006
1	<u>Islandia</u>	0.877	-	+0.018	+0.095
2	Norwegia	0.842	-	+0.007	+0.043
3	Finlandia	0.832	1	+0.012	+0.036
4	Swedia	0.820	-1	-0.002	+0.007
5	Nikaragua	0.804	-	-0.005	+0.147
6	Selandia Baru	0.799	1	-0.002	+0.048
7	Irlandia	0.798	2	+0.002	+0.065
8	Spanyol	0.795	21	+0.049	+0.063
9	Rwanda	0.791	-3	-0.013	n/a
10	Jerman	0.787	4	+0.011	+0.034

Sumber: *World Economic Forum*, 2020

Melalui data yang berasal dari laporan *Gender Inequality Index* dan *The Global Gender Gap Index*, Norwegia merupakan negara yang memiliki posisi yang tinggi terkait dengan kesetaraan gender. Melalui berbagai indikator yang diterapkan, baik oleh *United Nations Development Programme* maupun *World Economic Forum* dalam menentukan peringkat bagi negara-negara terkait dengan perihal kesetaraan gender, maka dapat disimpulkan bahwa Norwegia adalah negara yang berhasil dalam menerapkan dan melindungi kesetaraan gender bagi masyarakatnya, sesuai dengan posisinya dalam kedua data tersebut.

Implementasi dari kesetaraan gender di Norwegia saat ini juga dapat dilihat melalui tingginya partisipasi wanita dalam dunia politik. Pada tahun 2021, tercatat bahwa Pemerintahan Norwegia, secara mayoritas, diisi oleh wanita. Saat ini, wanita menempati 10 posisi kementerian, yang berarti bahwa perwakilan wanita berada pada tingkat 53% di pemerintahan (Ummelas, 2021). Selain itu, terdapat 45,6% wanita yang berada di dalam lembaga parlemen Norwegia atau *Storting* (Statista, 2021).

2.1.4 Pandangan Norwegia Terhadap Kesetaraan Gender

Saat ini, kesetaraan gender telah menjadi salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam sistem internasional. Hal ini dapat dilihat dari upaya, baik secara internasional maupun oleh masing-masing negara, dalam meningkatkan kesetaraan antar gender melalui peraturan-peraturan yang terbentuk. Namun demikian, meski dipandang penting secara internasional, konsep kesetaraan gender memiliki beragam interpretasi dalam praktiknya. Terkait dengan hal tersebut, Negara Norwegia memandang konsep kesetaraan gender sebagai tersedianya perlakuan yang sama (*equal treatment*) antara pria maupun wanita (Gustavsen, 2013:363–364). Pandangan yang berbeda mengenai kesetaraan gender tentu saja dipengaruhi oleh budaya dari masing-masing negara. Dalam hal ini, Norwegia yang memandang kesetaraan gender sebagai perlakuan yang setara didasari oleh paham Egalitarianisme yang menjadi dasar budaya nasionalnya. Egalitarianisme adalah sebuah pemahaman filosofi politik yang memandang bahwa manusia seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama (Arneson, 2013). Dianutnya Egalitarianisme di

Norwegia kemudian berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari di dalam negara tersebut, di mana para pemimpin politik kemudian berusaha untuk menerapkan kesetaraan, tidak hanya dalam tingkat makro masyarakat, tetapi juga pada tingkat mikro kehidupan sehari-hari. Karenanya, konsep kesetaraan gender di Norwegia kemudian lebih dari sebatas perlindungan hak-hak dasar, tetapi juga berfokus kepada pencapaian kesetaraan secara substantif di antara seluruh warga negaranya.

Dalam jurnal yang berjudul *Equal Treatment or Equal Opportunity? Male Attitudes Towards Women in the Norwegian and US Armed Forces*, dilakukan survei terhadap beberapa pria di Norwegia mengenai pandangannya akan wanita. Berdasarkan jurnal tersebut, ditunjukkan bahwa pria di Norwegia percaya bahwa ditetapkannya perbedaan dalam kebijakan militer, seperti contoh adanya perbedaan dalam standar fisik antara pria dan wanita, tidak seharusnya dilakukan. Mereka percaya bahwa adanya suatu kriteria seharusnya dapat dipenuhi oleh pria maupun wanita, tanpa memerhatikan perbedaan latar belakang gender. Selain itu, warga di Norwegia memandang bahwa kesetaraan gender seharusnya tidak hanya terkait dengan adanya persamaan keuntungan, tetapi juga persamaan dalam tanggung jawab. Survei tersebut menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Norwegia terkait dengan kesetaraan gender memang didasari oleh budaya nasional, di mana kesetaraan gender berarti memberikan perlakuan yang setara pula antara pria maupun wanita (Gustavsen, 2013, pp. 361–374).

2.2 Militer Di Norwegia

Norwegia sebagai suatu negara yang berdaulat tentunya memiliki kekuatan militer atau angkatan bersenjata di dalamnya. Angkatan bersenjata dalam Norwegia dikenal dengan nama *Forsvaret* dalam Bahasa Norwegia atau *Norwegian Armed Forces* dalam Bahasa Inggris. Militer dari Norwegia dapat ditelusuri sejak zaman Viking, yaitu pada abad ke-10, dan terus mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman. Saat ini, sistem organisasi yang digunakan dalam *Forsvaret* merupakan adaptasi dari perubahan yang dilakukan pada tahun 1990. Pada tahun tersebut, dilakukan perubahan pada militer Norwegia dari yang sebelumnya lebih berbentuk pertahanan dari invasi menjadi organisasi yang lebih terorganisir dengan kualitas yang lebih baik, persenjataan yang modern, serta lebih profesionalnya unit yang ada (The Norwegian Armed Forces, 2021a).

2.2.1 Misi Dan Nilai Militer Di Norwegia

a. Misi dari Milliter Norwegia

Sebagaimana dengan kekuatan militer di negara lainnya, militer di Norwegia memiliki misi utama untuk melindungi negara dari ancaman dan serangan. Namun secara lebih spesifik, berdasarkan laman resmi *Forsvaret*, Angkatan Bersenjata di Norwegia memiliki lima misi dalam menjalankan tugasnya.

Misi pertama dari Angkatan Bersenjata Norwegia adalah melindungi Norwegia dan aliansinya. Dalam hal ini, Angkatan Bersenjata Norwegia memiliki peran dalam memastikan bahwa tidak adanya ancaman terhadap Norwegia, yang juga termasuk dengan perihal terhadap nilai yang dianut, demokrasi, dan sistem politik. Misi perlindungan yang dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Norwegia juga

dilakukan dengan menjadi anggota dari *North Atlantic Treaty Organization* atau NATO, dengan tujuan memperkuat aliansi dalam menjaga keamanan.

Misi kedua yang dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Norwegia adalah melakukan pengawasan dan intelijen. Fungsi utama dari dilakukannya misi ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk kepentingan pengambilan keputusan, terutama pada saat-saat genting. Pengawasan yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Norwegia meliputi teritorial darat, laut, udara, dan juga digital. Informasi dan data yang dikumpulkan oleh Angkatan Bersenjata Norwegia penting dalam perihal pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri dan keamanan.

Misi ketiga adalah melindungi perbatasan serta kebebasan politik dan bertindak. Misi ini dapat dikategorikan sebagai upaya dari Angkatan Bersenjata Norwegia dalam melindungi kedaulatan negaranya. Perlindungan dan pelaksanaan kedaulatannya ini juga termasuk dalam kegiatan dari Angkatan Bersenjata Norwegia saat melakukan kerja sama internasional, seperti dengan NATO.

Misi keempat adalah berpartisipasi secara global. Kontribusi Norwegia dalam sistem internasional dilakukan dengan keanggotaannya dalam NATO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan dari partisipasi yang dilakukan oleh Norwegia adalah tak hanya untuk menjaga perdamaian dunia, tetapi juga untuk menjaga kestabilan dalam negeri Norwegia yang mungkin dapat terdampak dari krisis yang terjadi di luar negeri.

Misi terakhir adalah mendukung masyarakat sipil. Sumber daya yang dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Norwegia dapat menjadi pendukung saat polisi

maupun otoritas sipil lainnya membutuhkan bantuan. Contoh dari dukungan kepada masyarakat sipil dalam misi ini adalah dilakukannya operasi pencarian orang hilang, operasi kontra-terorisme di laut, dan lainnya (The Norwegian Armed Forces, 2021b).

b. Nilai dari Militer Norwegia

Dalam melaksanakan perannya, nilai juga menjadi salah satu hal yang penting untuk diaplikasikan. Di Angkatan Bersenjata Norwegia sendiri terdapat beberapa nilai yang telah mengakar. Nilai yang dianut dalam militer di Norwegia meliputi hormat (*respect*), tanggung jawab (*responsibility*), dan keberanian (*courage*).

Nilai hormat atau *respect* bukanlah merupakan hak, melainkan kewajiban moral yang dapat ditunjukkan melalui sikap dan tindakan. Dalam lingkup militer, para tentara diharapkan untuk menunjukkan sikap hormat kepada sesama, baik rekan maupun atasan, juga kepada masyarakat sipil. Sehingga, tidak ada perilaku rasisme maupun tindakan merendahkan manusia lainnya di dalamnya.

Nilai kedua, yaitu tanggung jawab (*responsibility*) dalam militer dapat ditunjukkan melalui kesediaan untuk mengambil inisiatif, ketegasan, dan ketekunan. Dengan bertanggung jawab, diharapkan kepercayaan antar anggota dalam Angkatan Bersenjata Norwegia dapat meningkat, mengingat bahwa dalam militer, tentara hidup satu sama lain dan saling bergantung, terutama dalam situasi yang genting. Pelaksanaan tanggung jawab juga penting dalam Angkatan Bersenjata Norwegia mengingat bahwa mereka adalah representasi dari negara Norwegia yang berdaulat.

Nilai ketiga, yaitu keberanian (*courage*) adalah salah satu elemen yang penting dalam militer. Operasi militer tentu saja tidak lepas dari risiko akan kehilangan nyawa, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini, keberanian jelas dibutuhkan dengan tujuan untuk pelaksanaan misi. Keberanian dalam nilai yang dianut oleh Angkatan Bersenjata Norwegia pun tak terbatas kepada keberanian secara fisik, tetapi juga secara moral. Keberanian dalam aspek militer juga perlu disertai dengan penilaian yang baik karena tanpanya, hal tersebut hanya akan berujung kepada kelalaian (The Norwegian Armed Forces, n.d.)

2.2.2 Unit Dalam Militer Di Norwegia

Forsvaret, sebagai Angkatan Bersenjata Norwegia, memiliki berbagai unit di dalamnya yang memegang peranan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Unit pertama dalam Angkatan Bersenjata Norwegia adalah Angkatan Darat. Dalam bahasa Norwegia, cabang ini memiliki nama *Haeren* atau dapat diartikan sebagai *Norwegian Army* dalam Bahasa Inggris. Sebagai Angkatan Darat dari Norwegia, maka *Haeren* memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan teritorial darat Negara Norwegia dari ancaman. Tentara Angkatan Darat di Norwegia merupakan cabang terbesar di dalam Angkatan Bersenjata di negara tersebut, di mana kepala dan stafnya berbasis di Bardufoss, Norwegia bagian Utara (The Norwegian Armed Forces, 2020a).

Cabang kedua adalah Angkatan Laut atau yang dikenal dengan nama *Kongelige Norske Sjøforsvaret* (*Royal Norwegian Navy*). Tugas utama dari cabang ini adalah untuk menjaga kedaulatan Norwegia yang terfokus di laut, serta melindungi kepentingan maritim Norwegia. Kondisi Norwegia sebagai negara

maritim yang terletak di Samudera Arktika berdampak kepada kebergantungannya terhadap laut. Sumber daya yang berada di dalam laut, seperti minyak, mineral, dan perikanan menjadi salah satu sumber utama ekonomi dari Negara Norwegia. Karenanya, untuk melindungi teritorial laut Norwegia, Angkatan Laut ini melakukan patroli dan berlayar di kawasan perairan Norwegia dan internasional. Basis utama dari Angkatan Laut Norwegia terletak di dua tempat, yaitu Pangkalan Laut *Haakonsværn* di *Bergen*, sebagai pusat dari Angkatan Laut Nasional Norwegia, dan Pangkalan Laut *Ramsund* di utara Norwegia. Secara garis besar, Angkatan Laut Norwegia juga terbagi menjadi dua departemen yang meliputi armada laut (*the fleet*) dan penjaga pantai (*the coast guard*) (The Norwegian Armed Forces, 2020d).

Cabang ketiga dalam Angkatan Bersenjata di Norwegia adalah Angkatan Udara. *The Royal Norwegian Air Force* atau yang dalam Bahasa Norwegia adalah *Luftforsvaret*. Sesuai namanya, maka Angkatan Udara Norwegia memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan, kontrol, dan perlindungan terhadap ruang udara Norwegia. Pelaksanaan peran dari Angkatan Udara Norwegia tak hanya dilakukan pada saat peperangan atau terjadinya krisis, tetapi juga saat situasi sedang damai. Markas dari Angkatan Udara Norwegia terletak di *Rygge* yang berada di sebelah tenggara Norwegia (The Norwegian Armed Forces, 2021c).

Cabang keempat dalam Angkatan Bersenjata Norwegia adalah *Home Guard* atau *Heimevernet*. *Home Guard* di Norwegia merupakan garda terdepan dalam pertahanan yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Norwegia. Fungsi utama dari *Home Guard* adalah menjaga teritorial, memperkuat kekuatan militer, dan

melindungi infrastruktur di Norwegia. Sebagai garis pertahanan pertama, *Home Guard* juga kemudian berperan dalam manajemen krisis nasional, serta mendampingi dalam peristiwa-peristiwa penting, seperti bencana alam dan operasi pencarian dan penyelamatan. Bagian ini terdiri dari 40.000 tentara yang tersebar di seluruh negeri. Tentara yang tergabung ke dalam unit ini adalah personil yang dipindahkan setelah menyelesaikan 12 bulan dari layanan awalnya. Markas dari *Home Guard* terletak di *Terningmoen* yang berada di Norwegia Timur. Cabang ini memiliki pusat pelatihannya sendiri yang berada di *Dombas* (The Norwegian Armed Forces, 2020c).

Cabang selanjutnya dalam Angkatan Bersenjata Norwegia adalah Pertahanan Siber atau *Cyberforsvaret*. Pertahanan Siber di Norwegia bertanggung jawab dalam hal melindungi sistem teknologi informasi dan komunikasi Angkatan Bersenjata Norwegia dari ancaman digital, baik dari aktor militer maupun penduduk sipil. Secara lebih mendetail, *Cyberforsvaret* mempunyai lima tugas. Pertama, menyediakan layanan, komando, kontrol, dan solusi komunikasi terkait teknologi informasi dan komunikasi kepada Angkatan Bersenjata Norwegia, baik di dalam maupun luar negeri. Tugas kedua adalah mengoperasikan dan mempertahankan infrastruktur komunikasi dari Angkatan Bersenjata Norwegia secara nasional. Ketiga, mendidik dan menghasilkan keahlian yang dibutuhkan, seperti teknisi komputer militer dan operator siber. Tugas keempat adalah menjadi motor penggerak digitalisasi dalam angkatan bersenjata, serta, mendeteksi kebutuhan untuk peralatan terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi

dalam pertahanan Norwegia. Pertahanan siber Norwegia ini berpusat di Jørstadmoen, Lillehammer (The Norwegian Armed Forces, 2020b).

2.2.3 Wajib Militer Di Norwegia

Norwegia merupakan salah satu negara yang turut menerapkan sistem wajib militer di dalam negaranya. Berbicara mengenai wajib militer, kebijakan tersebut bukanlah sebuah fenomena yang baru di negara tersebut. Dilakukannya wajib militer sudah pernah dilakukan sejak tahun 1953 saat dikeluarkannya Undang-Undang No. 29 Tanggal 17 Juli 1953 mengenai Wajib Militer di Norwegia (*the Conscription Act*). Dalam perundang-undangan tersebut, dinyatakan bahwa semua pria yang berusia 19 sampai 44 tahun diwajibkan untuk turut serta dalam kegiatan militer. Namun, dalam situasi perang, keterlibatan pria Norwegia dalam wajib militer dapat dimulai sejak usia 18 tahun. Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, Norwegia mengalami peningkatan dalam jumlah personel militer, di mana Angkatan Bersenjata Norwegia tercatat berada dalam jumlah terbesarnya pada rentang waktu 1950 sampai 1960-an. Pada puncaknya, terdapat 350 ribu tentara dalam Angkatan Bersenjata Norwegia (The Norwegian Armed Forces, 2021a). Tentara yang terlibat dalam wajib militer ini dapat tergabung ke dalam Angkatan Darat, Laut, Udara, maupun *Home Guard* dalam rentang waktu yang bervariasi.

Seiring berjalannya waktu, dilakukan beberapa perubahan terkait peraturan wajib militer di Norwegia. Pada 2001 dilakukan rancangan untuk mengurangi dan mengatur ulang struktur pertahanan Norwegia. Namun demikian, wajib militer tetap dilakukan dengan perubahan yang meliputi dikurangnya jumlah yang

dipanggil untuk dinas serta proses seleksi yang ditetapkan sesuai dengan syarat yang dibutuhkan (Regjeringen, 2001).

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tanggal 17 Juli 1953 mengenai Wajib Militer di Norwegia, berikut adalah ketentuan yang ditetapkan terkait dengan wajib militer di Norwegia:

- a. Semua pria kewarganegaraan Norwegia yang berusia 19 sampai 44 tahun wajib turut serta dalam kegiatan militer Norwegia;
- b. Pengecualian hanya diberlakukan untuk Pendeta yang ditahbiskan di gereja negara dan yang terdaftar pada denominasi;
- c. Semua yang secara sukarela terlibat dalam militer, ataupun menjadi murid dalam akademi militer, sebelum waktu yang ditentukan untuk wajib militer, dapat dihitung telah melaksanakan kewajibannya sejak waktu penerimaan, dengan syarat telah mencapai usia minimal 18 tahun;
- d. Dinas wajib militer di Norwegia terdiri dari dinas biasa (*ordinary service*) dan dinas luar biasa (*extraordinary service*);
- e. Dinas biasa (*ordinary service*) meliputi dinas pertama kali dan latihan, baik dengan perwira maupun pelatihan khusus lainnya;
- f. Dinas luar biasa (*extraordinary service*) meliputi latihan khusus dengan tujuan memperkuat Angkatan Bersenjata, termasuk kursus perwira dan instruksi khusus, latihan mobilisasi, dan latihan lapangan luar biasa. Tugas dari dinas luar biasa ini adalah untuk menjaga supremasi hukum

dan pekerjaan sipil, serta mempersiapkan layanan darurat untuk mempersiapkan kesiapsiagaan Angkatan Bersenjata;

- g. Wajib militer yang telah absen secara ilegal dapat dikenakan sanksi;
- h. Kondisi medis yang telah diajukan sebelum wajib militer dapat menjadi pertimbangan, di mana keputusan akan diputuskan oleh sebuah dewan yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang dokter (Ministry of Defence, 1953).

Pada 2010, dilakukan rancangan perubahan terhadap Undang-Undang No. 29 tanggal 17 Juli 1953 mengenai Wajib Militer di Norwegia (*the Conscription Act*), di mana wajib militer yang juga melibatkan wanita mulai diperkenalkan. Rancangan akan diterapkannya Wajib Militer Universal ini kemudian secara resmi ditetapkan pada tahun 2013 saat dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Wajib Militer Norwegia (*the Conscription Act*) pada 21 Juni 2013. Perubahan dalam kebijakan yang telah diamandemen tersebut kemudian akan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Juli 2015. Tak hanya itu, dilakukan pula amandemen terhadap Undang-Undang No. 28 tanggal 17 Juli 1953 mengenai Keamanan Dalam Negeri Norwegia (*the Homeland Security Act*) pada 1 Januari 2014 yang juga menjadi pendukung dilakukannya kebijakan Wajib Militer Universal di Norwegia (Ministry of Defense, 2014). Perubahan kebijakan di Norwegia tersebut didukung oleh Undang-Undang Norwegia pada Pasal 119 yang berisi:

"As a general rule every citizen of the State is equally bound to serve in the defence of the country for a specific period, irrespective of birth or fortune."

(The Constitution of the Kingdom of Norway, Article 119)

Melalui Pasal tersebut maka diketahui bahwa baik pria maupun wanita, yang merupakan warga negara Norwegia, memiliki kewajiban dalam hal bela negara dengan mengikuti wajib militer.

Wajib militer universal atau *Universal Conscription* yang dilakukan oleh Norwegia diatur di dalam Undang-Undang No. 77 Tanggal 12 Agustus 2016 dengan nama Undang-Undang mengenai Wajib Militer dan Dinas dalam Angkatan Bersenjata atau singkatnya disebut dengan Undang-Undang Pertahanan. Melalui Undang-Undang tersebut, secara spesifik pada Bab 2 Pasal 6, tertera bahwa semua warga negara Norwegia yang berusia 19 sampai 44 tahun memiliki wajib untuk mengikuti wajib militer. Hal ini menunjukkan bahwa baik pria maupun wanita sama dalam mengemban tanggung jawab wajib militer. Namun demikian, wajib militer yang berlaku di Norwegia tidak semata-mata langsung memasukkan semua Warga Negara Norwegia, baik pria maupun wanita, yang telah memenuhi prasyarat umur ke dalam militer. Di dalam Undang-Undang Pertahanan, terutama pada Bab 2 Pasal 7 sampai 10, dinyatakan bahwa terdapat proses yang perlu dilalui untuk seseorang benar-benar masuk ke dalam angkatan bersenjata dalam dinas wajib militernya. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan data yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Melalui data tersebut, maka dilakukanlah seleksi yang kemudian akan berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu tes fisik dan kesehatan. Melalui rangkaian pemeriksaan tersebut, maka kemudian akan terpilih para Warga Negara Norwegia yang akan menjalani dinas wajib militer dalam angkatan bersenjata dengan alokasinya masing-masing (Ministry of Defence, 2016).

2.3. Kesetaraan Gender Dalam Militer Di Norwegia

Norwegia sebagai negara yang berkaitan erat dengan kesetaraan gender jelas akan menerapkan unsur kesetaraan di berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut lantas tak luput dari aspek militer. Saat ini, Norwegia sedang menjadi sorotan internasional saat negara tersebut secara legal mengadopsi kebijakan wajib militer secara universal, yaitu yang melibatkan pria maupun wanita.

Kesetaraan gender dalam militer di Norwegia telah dapat diidentifikasi sejak sebelum Kebijakan Wajib Militer Universal dibentuk. Pada tahun 1984, *Storting* menghapuskan larangan terkait dengan peran wanita di dalam militer. Melalui keputusan tersebut, maka wanita dapat terlibat dalam militer di aspek mana pun, selama mereka memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Gustavsen, 2013, p. 362). Kemudian, pada 2010 rancangan perubahan terhadap Undang-Undang No. 29 tanggal 17 Juli 1953 mengenai Wajib Militer di Norwegia (*the Conscription Act*) diajukan. Dalam rancangan tersebut, kebijakan wajib militer akan turut melibatkan wanita dalam praktiknya. Rancangan akan diterapkannya Wajib Militer Universal ini kemudian secara resmi ditetapkan pada tahun 2013 saat dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Wajib Militer Norwegia (*the Conscription Act*) pada 21 Juni 2013. Perubahan dalam kebijakan yang telah diamandemen tersebut kemudian akan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Juli 2015. Tak hanya itu, dilakukan pula amandemen terhadap Undang-Undang No. 28 tanggal 17 Juli 1953 mengenai Keamanan Dalam Negeri Norwegia (*the Homeland Security Act*) pada 1 Januari 2014 yang juga menjadi pendukung dilakukannya kebijakan Wajib Militer Universal di Norwegia (Ministry of Defence,

2014c). Melalui amandemen terhadap kedua hukum tersebut, lantas Undang-Undang No. 29 tanggal 17 Juli 1953 mengenai Wajib Militer di Norwegia dan Undang-Undang No. 28 tanggal 17 Juli 1953 mengenai Keamanan Dalam Negeri Norwegia tak lagi berlaku dan digantikan oleh Undang-Undang No. 77 Tanggal 12 Agustus 2016 dengan nama Undang-Undang mengenai Wajib Militer dan Dinas dalam Angkatan Bersenjata atau singkatnya disebut dengan Undang-Undang Pertahanan (Ministry of Defence, 2016).

Diputuskannya kebijakan wajib militer universal di Norwegia jelas melibatkan berbagai pihak dalam proses pembahasannya. Pada 17 Februari 2014, Kementerian Pertahanan dari Norwegia (*Forsvaarsdepartementet*) mengirimkan proposal untuk amandemen terhadap Undang-Undang Wajib Militer di Norwegia (*the Conscription Act*) dan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri Norwegia (*the Homeland Security Act*) ke berbagai badan berwenang, yang meliputi kementerian, institusi terkait pertahanan, institusi akademik, serta berbagai asosiasi, dengan tujuan konsultasi. Kementerian yang terlibat dalam proses konsultasi meliputi:

- a. Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial (*Arbeids- og inkluderingsdepartementet*);
- b. Kementerian Anak, Kesetaraan Gender, dan Inklusi (*Barne- og likestillingsdepartementet*);
- c. Kementerian Keuangan (*Finansdepartementet*);

- d. Kementerian Kesehatan dan Layanan Perawatan (*Helse- og omsorgsdepartementet*);
- e. Kementerian Kehakiman dan Keamanan Publik (*Justis -og beredskapsdepartementet*);
- f. Kementerian Iklim dan Lingkungan (*Klima- og miljødepartementet*);
- g. Kementerian Pemerintah Daerah dan Modernisasi (*Kommunal -og distriksdepartementet*);
- h. Kementerian Kebudayaan (*Kulturdepartementet*);
- i. Kementerian Pendidikan (*Kunnskapsdepartementet*);
- j. Kementerian Pertanian dan Pangan (*Landbruks- og matdepartementet*);
- k. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian (*Nærings- og handelsdepartementet*);
- l. Kementerian Perminyakan dan Energi (*Olje- og energidepartementet*);
- m. Kementerian Transportasi (*Samferdselsdepartementet*); dan
- n. Kementerian Luar Negeri (*Utenriksdepartementet*) (Ministry of Defense, 2014).

Sementara itu, tenggat waktu dari konsultasi ditetapkan pada tanggal 1 April 2014. Berdasarkan laman resmi Norwegia, diketahui bahwa hanya beberapa badan saja yang menanggapi konsultasi tersebut, yaitu:

- a. Kementerian Anak, Kesetaraan Gender, dan Inklusi (*Barne- og likestillingsdepartementet*);

- b. Kementerian Kesehatan dan Layanan Perawatan (*Helse- og omsorgsdepartementet*);
- c. Kementerian Kehakiman dan Keamanan Publik (*Justis -og beredskapsdepartementet*);
- d. Kementerian Pertanian dan Pangan (*Landbruks- og matdepartementet*)
- e. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian (*Nærings- og handelsdepartementet*);
- f. Kementerian Transportasi (*Samferdselsdepartementet*); dan
- g. Kementerian Luar Negeri (*Utenriksdepartementet*) (Ministry of Defence, 2014b, p. 2).

Tujuan dari dilibatkannya berbagai macam aktor untuk berkonsultasi dalam pembuatan kebijakan wajib militer universal ini adalah agar prinsip yang dihasilkan untuk kebijakan wajib militer yang baru dapat lebih universal, yaitu mampu mengakomodasi baik pria maupun wanita.

Ketentuan yang berlaku mengenai wajib militer universal di Norwegia adalah sama dengan ketentuan wajib militer sebelumnya, saat masih hanya melibatkan pria. Hal ini berarti, segala persyaratan yang dibutuhkan adalah sama baik pria maupun wanita. Selain itu, tidak ada perbedaan perlakuan terhadap tentara pria maupun wanita, seperti contoh, untuk tempat tinggal, barak perempuan dan laki-laki akan menjadi satu dan tidak dipisahkan berdasarkan gender, mengingat bahwa kesetaraan gender menjadi salah satu alasan ditetapkannya peraturan ini. Selain itu, berdasarkan amandemen Undang-Undang Pertahanan yang sekarang

memuat mengenai Wajib Militer, kebijakan wajib militer ini tidak berlaku bagi wanita lahir sebelum 1 Januari 1997 (Ministry of Defence, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang No. 77 Tanggal 12 Agustus 2016 dengan nama Undang-Undang mengenai Wajib Militer dan Dinas dalam Angkatan Bersenjata di Norwegia, ketentuan dalam Wajib Militer Universal adalah sebagai berikut.

- a. Semua pria dan wanita kewarganegaraan Norwegia yang berusia 19 sampai 44 tahun wajib turut serta dalam kegiatan militer Norwegia;
- b. Tidak berlaku bagi wanita yang lahir sebelum 1 Januari 1997;
- c. Pengecualian hanya diberlakukan untuk Pendeta yang ditahbiskan di gereja negara dan yang terdaftar pada denominasi;
- d. Angkatan Bersenjata Norwegia memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan memproses data pribadi dari masyarakat Norwegia yang berusia mulai dari 17 tahun untuk kebutuhan terkait dengan wajib militer;
- e. Setelah memproses data, maka akan dilakukan pemanggilan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, tes fisik, serta pemeriksaan terkait lainnya yang dilakukan oleh para dokter untuk memastikan apakah seseorang tersebut dapat mengikuti wajib militer atau tidak. Pemeriksaan ini berlaku juga untuk mereka yang sudah berada dalam militer;
- f. Warga Negara Norwegia yang dipanggil setelah melalui seluruh rangkaian pemeriksaan kelayakan dan kesiapan wajib militer wajib untuk segera

melaporkan dirinya untuk pengalokasian dari dinas wajib militer yang akan dijalaninya;

- g. Sedangkan bagi mereka yang tidak terdaftar untuk melanjutkan dinas dalam Angkatan Bersenjata dapat dipindahkan ke Pertahanan Sipil atau Kepolisian;
- h. Di saat genting, seperti saat terjadinya ancaman perang, maka Raja memiliki kewenangan untuk memperluas rentang umur dari wajib militer, yaitu dari 18 sampai 55 tahun. Selain itu, mereka yang sebelumnya dinilai tidak dapat mengikuti dinas wajib militer dalam Angkatan Bersenjata Norwegia dapat kembali dipanggil untuk menjalankan tugas;
- i. Dinas wajib militer di Norwegia terdiri dari dinas biasa (*ordinary service*) dan dinas luar biasa (*extraordinary service*);
- j. Dinas biasa (*ordinary service*) meliputi dinas pertama kali, latihan, dinas keamanan tanah air tahunan, serta pelatihan bagi perwira dan spesialis;
- k. Dinas luar biasa (*extraordinary service*) terdiri dari dinas untuk mencegah dan membatasi dampak dari bencana alam maupun kecelakaan lainnya, menjaga serta mengamankan objek dan infrastruktur, tugas untuk melindungi kepentingan masyarakat penting lainnya, latihan khusus untuk memperkuat Angkatan Bersenjata, dan layanan darurat untuk pembangunan kekuatan; serta
- l. Tugas wajib militer dapat berlangsung sampai kurun waktu 19 bulan untuk dinas biasa (Ministry of Defence, 2016).

Ketetapan yang tertulis tersebut berlaku secara adil untuk pria maupun wanita, sehingga tidak terdapat perbedaan dalam syarat masuk kewajiban wajib militer bagi warga negara Norwegia. Seperti yang tertera di dalam Undang-Undang tersebut, bahwa terdapat salah satu syarat yaitu tes perlu dilalui untuk memeriksa kelayakan dan kesanggupan dari para warga negara Norwegia yang telah terdaftar. Salah satu tes yang dilakukan adalah tes fisik. Dalam pemeriksaan berbasis fisik ini, dilakukan sistem penilaian, di mana dalam setiap aktivitas fisik yang dijalani, telah terdapat poin yang terdiri dari angka satu (1) sampai sembilan (9), yang kemudian jumlah totalnya akan dirata-ratakan. Poin tertinggi dalam masing-masing tes fisik memiliki standar yang sama, baik bagi pria maupun wanita. Seperti contoh, dalam tes fisik lempar bola (*sittande medisinballstøyt*), poin tertinggi, yaitu 9, memiliki kriteria lemparan sejauh 3,5 meter, untuk pria dan wanita. Kemudian, poin tertinggi untuk lompat jauh berdiri (*stille lengde*) memiliki kriteria lompatan sejauh 2,45 meter untuk nilai tertingginya, bagi pria serta wanita. Lalu, ada juga tes fisik berupa *pull up* (*kroppsheving i bom*) yang memiliki poin tertinggi sembilan dengan jumlah 12 kali pengulangan. Selain itu, dilakukan juga olahraga dengan alat *treadmill*, di mana poin tertinggi dicapai oleh standar waktu 13.30 (Forsvaret, 2021). Selain itu, persamaan perlakuan antara pria dan wanita juga dapat terlihat di dalam Angkatan Bersenjata Norwegia sendiri. Salah satu kebijakan yang mulai diterapkan oleh Angkatan Bersenjata Norwegia adalah ditematkannya pria dan wanita dalam asrama yang sama, atau dengan kata lain, tidak adanya pemisahan secara gender dalam hal tempat tinggal selama waktu dinas (The Local, 2014).

Sejak dilakukannya kebijakan wajib militer universal di Norwegia, keterlibatan wanita dalam militer lantas meningkat. Berdasarkan laporan dari Angkatan Bersenjata Norwegia, persentase wanita yang terdaftar wajib militer meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 terdapat 21%, kemudian 2018 terdapat 28,5%, pada 2019 terdapat 29% dan pada 2020 terdapat 33% wanita (SecurityWomen, 2021).